

GNAI dan Urgensi Mewaspada Geliat Politisasi Agama

written by Ferdiansyah



[Harakatuna.com](https://www.harakatuna.com) - Belakangan ini terjadi perbincangan cukup pelik di media sosial, perihal deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamophobia (GNAI). Menurut sebagian pengamat, GNAI ini menjadi gerakan politis untuk mendulang simpati umat Islam menuju tahun politik 2024.

Dengan label melawan Islamophobia, mereka berusaha menawarkan gagasan yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan realitas keindonesiaan dewasa ini. Deklarasi mereka pada Jumat, (15/7) kemaren menunjukkan adanya geliat gerakan politisasi agama, ditandai dengan perkawinan (sinergi) antara para politisi dengan agamawan.

Deklarasi GNAI ini digelar di Aula Buya Hamka Masjid Al Azhar Jakarta yang dihadiri sejumlah tokoh, yakni Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (PKS),

Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Partai Ummat Buni Yani, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani, Habib Mukhsin, Mustofa Nara, Refly Harun, Alfian Tandjung, Habib Umar Husain dan sejumlah tokoh dan aktivis lainnya. Termasuk mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang, mantan anggota DPR Ariadi Ahmad, Rizal Fadilah, Anton, aktivis era 98 Andrianto.

Sementara di jajaran inisiator dan pendiri GNAI ada nama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono, Cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Hasbullah yakni Gus Aam, Ahmad Dhani Prasetyo, Habib Mukhsin, Ustadz Umar Husein, Ustaz Alfian Tandjung.

Selain itu, sejumlah tokoh juga memberikan testimoni lewat video yang ditayangkan di lokasi acara, antara lain Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva. Deklarasi dan pernyataan sikap GNAI dibacakan oleh Presidium GNAI, Ferry Juliantono. "Kesadaran baru itu kini telah termanifestasikan dalam bentuk pencanangan Hari Anti Islamophobia se-Dunia," dilansir dari Sindonews.com, (15/07/22).

Secara ekspilisit, Gus Nadirsyah Hosen mengkritik keras di akun twitternya bahwa deklarasi GNAI sebagai deklarasi yang politis: jualan emosi umat. "Gak ada Islamophobia di Indonesia. Presiden sudah naik haji, bahkan masuk Ka'bah dan makam Nabi Muhammad. Wapresnya ulama besar. Rukun Iman-Rukun Islam semuanya bisa dijalankan & difasilitasi di Indonesia. Yang ada itu, politisi jualan emosi umat. Ayo cerdaskan umat, jangan mau dibohongi terus," Minggu (17/7).

Ini menunjukkan bahwa gerakan GNAI ini hanyalah dagangan mereka untuk mendulang simpati umat Islam Indonesia sebagai pemilih mayoritas agar nantinya dapat mendongkrak elektabilitas partai Islam yang belakangan ini masih berjalan merangkak. Dari realitas di atas kita bisa menelaah bahwa aktor di dalamnya adalah politisi ulung yang berlatar belakang Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Ummat dan sebagainya.

Mewaspadaai Politisasi Agama

Untuk itu, kita sebagai warga negara harus cerdas dalam mengamati realitas politik di negeri ini, mengingat menuju tahun politik 2024, politisasi agama dan politik idenitas akan masih terus menjadi momok yang menakutkan dan akan

terus menjadi produk dagangan elit untuk pemenangan kontestasi politik mereka. Dalam konteks GNAI ini, kita perlu belajar dari isu SARA seperti yang terjadi pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dengan terbentuknya 212 dan sebagainya.

Sebenarnya regulasi mengenai SARA telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 menggariskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Mereka diharamkan pula menghasut dan mengadu domba. Namun realitasnya masih mudah kita jumpai di medsos maupun di dalam kehidupan nyata ungkapan narasi provokatif.

Menurut Eki Baihaki (2022), sesungguhnya tidak ada kehidupan manusia dalam beragam dimensinya yang tidak terkait dengan politik, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Agama sejatinya adalah penguat hubungan antar manusia, meskipun berbeda keyakinan. Namun realitasnya senantiasa ada aktor politik dan agama yang mempertentangkan dan mendegradasikan peran suci agama untuk tujuan politik.

Politik yang makna awalnya adalah positif, untuk menghadirkan kebijakan publik perlu diterangi oleh nilai agama. Namun terdapat realitas yang diametral, sebagaimana yang diungkap Gus Dur, "Agama mengajarkan pesan-pesan damai. Namun para ekstremis akan memutar balikkannya.

Kita butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah." Politisasi agama adalah sebuah realitas yang memprihatinkan. Politisasi agama digemari karena merupakan cara yang relatif praktis, murah untuk merebut emosi dan simpati masyarakat. Utamanya bagi masyarakat yang minim literasi politik.

Bagi masyarakat yang minim literasi politik dan minim rasionalitas, mereka akan cenderung fanatik. Bahkan yang rasionalitasnya baik pun, namun minim etika, maka politisasi agama adalah peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik.

Di antaranya memanfaatkan simbol agama dan dukungan tokoh-tokoh agama yang menjajakan ayat dan fatwa agama untuk kepentingan politik, agar kandidatnya bisa terpilih. Termasuk branding diri untuk mencitrakan diri sebagai penganut agama yang taat, meski setelah kekuasaan dapat direbut, kembali ke karakter aslinya yang tentu berbeda.

Oleh karenanya, kita perlu mewaspadaai gerakan politik yang berjubah agama. GNAI di sini jelas berusaha menjual agama sebagai dagangan politik. Maka agar kita tidak terkecoh oleh mereka, kita perlu menguatkan literasi politik dan rasionalitas, karena inilah modal utama yang kita butuhkan mendekati tahun politik 2024 agar kita tidak tergelincir oleh berbagai kepentingan politis partisan. Semoga.